

**Kolaborasi Pemkot Surabaya Dan Mahasiswa
Dalam Menjalankan Program Sinau Bareng Di Kelurahan Karangpilang**

Wahyu Candrawulan^{1)*}, Sri Roekminiati²⁾, Sapto Pramono³⁾, Aris Sunarya⁴⁾

^{1,2,3,4)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

¹⁾wahyucandrawulan483@gmail.com, ²⁾sri.roekminiati@unitomo.ac.id,

³⁾sapto.pramono@unitomo.ac.id, ⁴⁾aris.sunarya@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Program *Sinau Bareng* di Kelurahan Karangpilang, Surabaya, merupakan inisiatif kolaboratif antara Pemerintah Kota Surabaya, mahasiswa, masyarakat dan media yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak dalam menghadapi tantangan era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program berdasarkan konsep *collaborative governance* dengan menyoroti peran pemerintah sebagai fasilitator, keterlibatan mahasiswa sebagai tenaga pengajar, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan motivasi belajar anak-anak serta mempererat hubungan sosial di lingkungan setempat. Faktor utama keberhasilan program mencakup kepemimpinan fasilitatif pemerintah, desain kelembagaan yang partisipatif, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Namun, tantangan seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya pemahaman awal mahasiswa, serta kendala waktu dan adaptasi lingkungan tetap menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Temuan ini menegaskan bahwa kolaborasi multiaktor yang efektif dapat memperkuat keberhasilan program pendidikan berbasis komunitas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan pendidikan nonformal di tingkat lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci : Collaborative Governance, Pendidikan Berbasis Komunitas,
Kolaborasi Pemerintah, Partisipasi Mahasiswa, Program Sinau Bareng.**

Abstract

The Sinau Bareng Program in Karangpilang, Surabaya, is a collaborative initiative involving the Surabaya City Government, university students, the local community, and the media, aimed at enhancing children's educational quality in response to the challenges of the digital era. This study seeks to analyze the program's implementation through the lens of collaborative governance, emphasizing the government's role as a facilitator, the involvement of university students as educators, and community participation in ensuring the program's sustainability. Employing a descriptive qualitative approach, this research gathers data through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The findings indicate that the program positively impacts children's learning motivation while

strengthening social relationships within the local environment. Key success factors include the government's facilitative leadership, participatory institutional design, and a continuous monitoring and evaluation mechanism. However, challenges such as limited facilities, students' initial lack of understanding, and constraints related to time and environmental adaptation remain obstacles in program execution. These findings affirm that effective multi-actor collaboration can enhance the success of community-based educational programs. This study is expected to serve as a reference for developing more inclusive and sustainable local non-formal education policies.

Keywords : *Collaborative Governance, Community Based Education, Government Collaboration, Student Participation, Sinau Bareng Program.*

A. LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi yang beragam, menghadapi tantangan besar dalam memastikan akses pendidikan berkualitas yang merata, terutama di kawasan perkotaan dan semi-perkotaan. Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi terpadat di Indonesia, mencerminkan kondisi ini, dengan Surabaya sebagai cerminan kompleksitas tersebut. Sebagai ibu kota provinsi, Surabaya telah mengalami urbanisasi yang pesat, membawa dampak pada kesenjangan pendidikan, khususnya di kalangan masyarakat kurang mampu (Titisari et al., 2023). Perkembangan teknologi dan dinamika sosial juga memengaruhi pola belajar anak-anak, dengan meningkatnya waktu bermain gawai dan berkurangnya keterlibatan orang tua dalam mendukung pendidikan mereka (Siswanto, 2024).

Kelurahan Karangpilang, sebuah wilayah di bagian barat daya Kota Surabaya, menjadi salah satu gambaran nyata dari permasalahan ini. Di wilayah ini, banyak anak-anak yang menghadapi keterbatasan sumber daya pendidikan, waktu belajar yang berkurang, serta rendahnya motivasi akademis yang diperparah oleh kesibukan orang tua mereka (Kamaliya & Anshori, 2024). Melihat tantangan tersebut, Pemerintah

Kota Surabaya bersama tokoh masyarakat dan kelompok Karang Taruna meluncurkan program *Sinau Bareng*. Program ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pendidikan dengan menciptakan lingkungan belajar kolaboratif yang melibatkan anak-anak, orang tua, mahasiswa, serta anggota masyarakat. Pendekatan holistik ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan pendidikan dan sosial masyarakat setempat (Siswanto, 2024).

Program *Sinau Bareng* di Kelurahan Karangpilang merupakan inisiatif kolaboratif yang lahir dari keprihatinan terhadap kondisi pendidikan anak-anak di tengah perkembangan teknologi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan akses terhadap perangkat digital telah membawa dampak positif sekaligus tantangan bagi anak-anak. Salah satu tantangan yang menjadi sorotan adalah kecanduan bermain *gadget* yang berdampak pada penurunan kualitas waktu belajar mereka (Sajidah et al., 2024). Selain itu, padatnya aktivitas orang tua yang sibuk bekerja seringkali mengurangi perhatian terhadap pendidikan dan pengembangan anak. Situasi ini mendorong tokoh masyarakat dan Karang Taruna RT 06 RW 02 untuk menggagas program *Sinau Bareng* sebagai solusi berbasis komunitas.

Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi anak-anak melalui pendekatan yang inklusif dan kolaboratif (Kamaliya & Anshori, 2024). Tujuan utamanya adalah memberikan pendampingan belajar bagi anak-anak, memotivasi mereka untuk lebih semangat dalam belajar dan mengaji, serta menyediakan wadah yang memungkinkan mereka beraktivitas secara positif, rekreatif, dan produktif. Dengan adanya *Sinau Bareng*, diharapkan anak-anak di Karangpilang dapat mengembangkan potensi akademik dan karakter mereka, sekaligus mengurangi dampak negatif dari kecanduan teknologi (Ghozalyfah & Ratnawati, 2024).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kolaborasi antara Pemkot Surabaya, mahasiswa, dan masyarakat menjadi elemen kunci. Mahasiswa sebagai generasi muda yang memiliki wawasan dan semangat juang diharapkan mampu

menjadi fasilitator dalam kegiatan ini. Namun, pada tahap awal pelaksanaan, beberapa tantangan muncul, seperti kurangnya motivasi mahasiswa yang belum memahami manfaat program ini, keterbatasan fasilitas pengajaran, serta kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Mengatasi kendala ini membutuhkan perencanaan matang, pelatihan peserta, dan komunikasi yang efektif di antara semua pihak terkait (Sajidah et al., 2024). Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat, *Sinau Bareng* memiliki potensi besar untuk menjadi model pembelajaran komunitas yang mampu mengatasi berbagai tantangan pendidikan. Program ini juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh penyelenggara kegiatan, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal (Kamaliya & Anshori, 2024).

Tabel 1. Realisasi Titik Balai RW Program *Sinau Bareng*



Sumber: Jatim News, 2025

Seiring berjalannya waktu, program ini menjadi salah satu bagian dari Program *Sinau dan Ngaji Bareng* yang lebih luas, yang dikelola oleh Pemkot Surabaya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa program ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan kelanjutan dari Program

Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH). Dalam program ini, orang tua didorong untuk mengajari anak-anak mereka di rumah, yang kemudian didukung oleh kegiatan *Sinau dan Ngaji Bareng* di Balai RW sebagai tindak lanjutnya. Dengan kolaborasi berbagai elemen masyarakat, seperti Tim Penggerak (TP) PKK dan

Kader Surabaya Hebat (KSH), program ini telah berjalan secara konsisten dan memberikan dampak positif di berbagai wilayah Surabaya (Sulistyowaty et al., 2024).

Sejak diresmikan oleh Wali Kota Eri Cahyadi pada 2 September 2023, Program *Sinau dan Ngaji Bareng* di Balai RW telah mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah lokasi pelaksanaannya. Program *Sinau Bareng* awalnya diselenggarakan di 220 titik Balai RW di seluruh Kota Surabaya. Namun, dalam waktu singkat, jumlah titik pelaksanaan program ini mengalami peningkatan menjadi 238 Balai RW, termasuk perluasan ke wilayah Lakarsantri dan beberapa kelurahan lainnya. Peningkatan jumlah lokasi pelaksanaan ini

mencerminkan respons positif dari masyarakat terhadap program tersebut serta upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memperluas akses pendidikan nonformal di tingkat komunitas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya pada tahun 2020, jumlah Rukun Warga (RW) di Kota Surabaya mencapai 1.360 RW. Dengan demikian, cakupan program *Sinau Bareng* yang telah menjangkau 238 Balai RW menunjukkan proporsi partisipasi yang signifikan. Peningkatan jumlah titik pelaksanaan program ini mengindikasikan tingginya antusiasme masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan serta komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan pembelajaran berbasis komunitas. (Suyono et al., 2023).

Banyaknya RT dan RW Menurut Kecamatan Di Kota Surabaya Tahun 2020

Wilayah	Jumlah RT	Jumlah RW
Karungpilang	187	29
Jambangan	138	26
Gayungan	163	30
Wonorejo	229	44
Tenggilis Mejoyo	156	25
Gunung Anyar	183	29
Rungkut	408	74
Sukoharjo	365	67
Mulyorejo	287	53
Cubeng	422	52
Wondokromo	504	58
Dukuh Pakis	160	31
Wiyung	171	34
Lakarsantri	163	31
Sambikerep	209	37
Tandes	314	51
Sukomanunggal	281	36
Sawahan	549	72
Tegayari	312	48
Genteng	298	61
Tambaksari	663	78
Kenjeran	414	38
Bulak	132	21
Sinokerto	318	48
Semampir	561	70
Pabean Cantian	320	52
Bubutan	365	44
Kembaringan	382	44
Asemrowo	119	17
Berowo	138	26
Pakal	191	34
Kota Surabaya	9.117	1.360

Gambar 2. Data Jumlah RT dan RW di Kota Surabaya 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya, 2025

Peningkatan jumlah lokasi pelaksanaan Program *Sinau Bareng* di Balai RW dari tahun 2022 ke 2023 terbilang lambat dibandingkan dengan total jumlah RW di Kota Surabaya yang mencapai 1.360 RW. Salah satu faktor utama yang menyebabkan keterbatasan ekspansi ini adalah keterbatasan sumber

daya, baik dari segi anggaran, tenaga pengajar, maupun fasilitas pendukung di setiap Balai RW. Selain itu, tidak semua RW memiliki infrastruktur yang memadai untuk menyelenggarakan program ini, sehingga proses perluasan harus menyesuaikan dengan kesiapan masing-masing wilayah. Faktor lain yang turut

mempengaruhi adalah kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat di beberapa RW mengenai manfaat program ini, yang menyebabkan rendahnya inisiatif untuk mengadopsinya secara lebih luas.

Lambatnya ekspansi program juga dapat disebabkan oleh perbedaan tingkat prioritas dalam kebijakan Pemerintah Kota Surabaya. Meskipun program ini memiliki dampak positif, pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran dan sumber daya untuk berbagai sektor lainnya, sehingga pertumbuhannya tidak bisa berlangsung secara merata dalam waktu singkat. Selain itu, koordinasi antara pemerintah dan RW dalam mengimplementasikan program ini juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua RW memiliki kesiapan administrasi dan sumber daya manusia untuk menjalankan program secara mandiri, sehingga memerlukan pendampingan lebih lanjut sebelum dapat diterapkan secara efektif.

Jika Program *Sinau Bareng* tidak dapat dilaksanakan secara merata di seluruh RW, maka akan muncul ketimpangan dalam akses pendidikan nonformal. RW yang tidak tersentuh program ini berisiko mengalami kesenjangan dalam hal kualitas sumber daya manusia, yang dalam jangka panjang dapat memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi di Kota Surabaya. Selain itu, potensi Balai RW sebagai sarana edukasi berbasis komunitas menjadi kurang dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembelajaran berbasis komunitas akan menurun, yang dapat menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi dan kualitas pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, percepatan pemerataan program ini menjadi langkah strategis yang harus diupayakan guna mewujudkan Surabaya sebagai kota yang

berdaya saing dalam bidang pendidikan dan literasi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, mengungkapkan bahwa program ini tidak hanya fokus pada pendampingan akademik, tetapi juga pada pengembangan bakat dan kreativitas anak-anak. Dengan melibatkan pemuda Karang Taruna dan mahasiswa sebagai tenaga pengajar, program ini membuka peluang bagi anak-anak untuk belajar keterampilan baru, seperti bermain alat musik. Kolaborasi yang konsisten antara pemerintah, masyarakat, RT, RW, dan KSH sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program ini. Yusuf berharap konsistensi ini dapat terus terjaga untuk mendukung motivasi anak-anak agar aktif berpartisipasi di Balai RW (Suyono et al., 2023).

Dengan adanya peningkatan jumlah lokasi pelaksanaan dan penguatan kolaborasi antara berbagai pihak, Program *Sinau Bareng* di Balai RW memiliki potensi besar untuk menjadi model pengembangan komunitas yang inovatif dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya mendorong peningkatan pendidikan, tetapi juga membangun kebersamaan dan sinergi di tengah masyarakat Surabaya (Purwanti et al., 2023).

Penelitian ini berdasarkan penelitian sebelumnya menurut (Kristiyono et al., 2023) menyoroti pentingnya pengembangan komunitas melalui kolaborasi pendidikan dalam konteks era digital. Dalam penelitian tersebut, Program *Sinau Bareng* digunakan untuk mendukung pelaku UMKM di Bojonegoro dalam meningkatkan kompetensi *digital marketing*. Hasilnya menunjukkan bahwa kolaborasi komunitas mampu menciptakan inovasi dan keberhasilan program dalam

meningkatkan keterampilan berbasis lokal. Studi ini memberikan landasan teoritis terkait pentingnya pengelolaan komunitas yang efektif serta relevansi teknologi dalam mendukung program berbasis pemberdayaan.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kebijakan, pendanaan, serta regulasi yang memungkinkan program berbasis komunitas dapat berjalan secara berkelanjutan. Kolaborasi dengan pemerintah dapat mencakup penyediaan fasilitas, pelatihan bagi tenaga pendidik. Dengan adanya dukungan regulasi, program seperti *Sinau Bareng* dapat lebih terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

Sementara itu, media baik dalam bentuk media massa maupun media digital dapat berfungsi sebagai alat untuk memperluas jangkauan program dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Media berperan dalam menyebarkan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan, menarik lebih banyak partisipan, serta membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pemberdayaan berbasis komunitas. Selain itu, media sosial dapat menjadi sarana interaktif yang memungkinkan masyarakat berbagi pengalaman dan informasi terkait program, sehingga memperkuat jaringan komunitas dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Dalam penelitian ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media dapat memperkuat keberhasilan Program *Sinau Bareng*. Studi kasus di beberapa daerah yang telah mengimplementasikan program ini akan dilakukan untuk memahami praktik terbaik dalam kolaborasi tersebut.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Konsep *Collaborative Governance*

Konsep *collaborative governance* telah menjadi pendekatan yang semakin relevan dalam kebijakan publik, terutama dalam menghadapi kompleksitas permasalahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Model tata kelola ini menekankan partisipasi aktif, dialog deliberatif, serta sinergi antara aktor pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil guna mencapai tujuan bersama. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan *collaborative governance* sangat bergantung pada faktor-faktor seperti kepercayaan antar pemangku kepentingan, kapasitas institusional, serta mekanisme koordinasi yang efektif. Oleh karena itu, kajian mengenai *collaborative governance* menjadi krusial dalam memahami dinamika interaksi multiaktor dan implikasinya terhadap efektivitas kebijakan publik.

Menurut (Emerson et al., 2012), *collaborative governance* didefinisikan sebagai proses dan struktur yang memungkinkan berbagai aktor dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk berinteraksi secara konstruktif, berbagi sumber daya, dan mencapai tujuan bersama melalui upaya kolektif yang berkelanjutan. Mereka mengembangkan *Integrative Framework for Collaborative Governance*, yang menyoroti tiga elemen utama, yaitu dinamika sistem (*mutual trust, shared motivation*), rezim kolaboratif (aturan dan norma yang mengatur kerja sama), serta aksi kolaboratif yang bersifat adaptif. Dalam pandangan mereka, *collaborative governance* bukan sekadar kerja sama antaraktor, tetapi juga melibatkan pembelajaran bersama, adaptasi kebijakan, serta komitmen jangka panjang dalam membangun tata kelola yang lebih efektif

dan inklusif.

Menurut (Bryson et al., 2015), *collaborative governance* merupakan bentuk kepemimpinan lintas sektor yang memungkinkan aktor-aktor dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil bekerja sama untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai secara mandiri oleh satu sektor saja. Mereka menekankan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif bergantung pada faktor-faktor seperti kepemimpinan bersama (*shared leadership*), struktur tata kelola yang fleksibel, serta mekanisme koordinasi yang efektif. Selain itu, mereka menyoroti pentingnya membangun kepercayaan, mengelola dinamika kekuasaan, dan menciptakan nilai publik melalui kerja sama yang berkelanjutan. Dalam pandangan mereka, *collaborative governance* bukan hanya sekadar koordinasi antaraktor, tetapi juga proses strategis yang melibatkan negosiasi, inovasi, dan adaptasi dalam menghadapi tantangan kebijakan yang kompleks.

Berdasarkan paparan di atas proses kolaborasi terdiri dari beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dengan baik, karena setiap tahapan memiliki peran strategis dalam pengelolaan urusan publik. Model kolaborasi yang diterapkan harus disesuaikan agar dapat menciptakan kerja sama yang efektif di antara berbagai pemangku kepentingan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan proses kolaboratif tidak selalu mudah, karena adanya perbedaan karakter, kepentingan, serta perspektif dari masing-masing pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif dan komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam kolaborasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Selanjutnya, (Ansell & Gash,

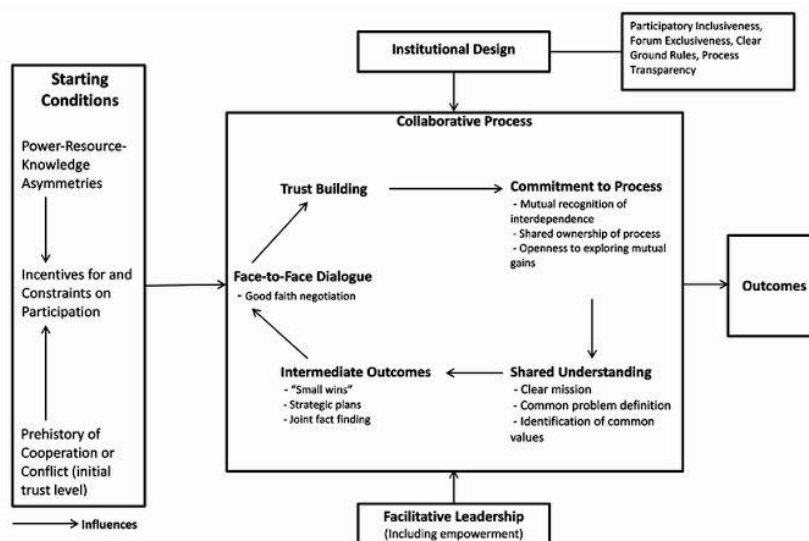
2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai suatu proses tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor publik dan non-publik dalam pengambilan keputusan kolektif melalui interaksi yang bersifat deliberatif dan konsensus. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas kebijakan publik yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral oleh pemerintah. Dalam banyak kasus, pemerintah menghadapi keterbatasan sumber daya, kapasitas, dan legitimasi dalam menangani permasalahan yang bersifat multidimensional, sehingga pendekatan kolaboratif menjadi semakin relevan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, *collaborative governance* bertujuan untuk menciptakan solusi kebijakan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Model tata kelola ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan perspektif berbeda, serta adanya mekanisme koordinasi yang efektif untuk memastikan bahwa setiap pihak dapat memberikan kontribusi yang optimal. Dalam perspektif ini, tata kelola kolaboratif tidak hanya dipahami sebagai bentuk kerja sama antaraktor, tetapi juga sebagai pendekatan sistematis dalam mengelola konflik, membangun kepercayaan, dan menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik.

(Ansell & Gash, 2008) mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mempengaruhi efektivitas *collaborative governance*, yang mencakup kondisi awal (*starting conditions*), kepemimpinan fasilitatif, serta proses kolaborasi yang bersifat inklusif. Kondisi awal sangat berpengaruh terhadap dinamika kolaborasi karena mencerminkan sejauh mana pemangku

kepentingan memiliki kesetaraan dalam kapasitas dan sumber daya yang mereka miliki. Faktor-faktor seperti ketidakseimbangan kekuasaan, sejarah konflik antaraktor, serta tingkat kepercayaan di antara para pemangku kepentingan dapat menentukan apakah proses kolaborasi akan berjalan dengan lancar atau justru mengalami hambatan. Jika kondisi awal tidak mendukung, maka upaya membangun kepercayaan dan komitmen bersama menjadi lebih sulit, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas tata kelola kolaboratif.

Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif tidak hanya membutuhkan kesiapan teknis, tetapi juga aspek sosial dan politik yang memungkinkan

terjalannya hubungan kerja sama yang produktif di antara aktor yang terlibat. Selain itu, kepemimpinan fasilitatif menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog terbuka dan negosiasi yang konstruktif. Pemimpin dalam konteks *collaborative governance* tidak bertindak secara otoritatif, tetapi lebih berperan sebagai fasilitator yang memastikan bahwa setiap aktor memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kepemimpinan yang baik dapat membantu meredam konflik, memfasilitasi komunikasi yang efektif, serta membangun rasa saling percaya di antara pemangku kepentingan.



Gambar 3. Model Collaborative Governance Ansell & Gash

Sumber: Zira Brenda Wiranti, 2022

Menurut model yang dikembangkan oleh (Ansell & Gash, 2008), proses kolaborasi pemerintahan terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama, *starting condition*, menyoroti pentingnya keseimbangan sumber daya antar *stakeholders* serta insentif untuk berpartisipasi. Ketika terjadi ketimpangan

sumber daya, pihak yang lebih kuat cenderung mendominasi kerja sama, sehingga diperlukan komitmen untuk mendukung pihak yang lebih lemah serta membangun kepercayaan sejak awal agar potensi permasalahan dapat diantisipasi. Selanjutnya, *facilitative leadership* menekankan peran kepemimpinan yang mampu menjaga stabilitas interaksi,

memperkuat kepercayaan, menghindari konflik, serta memfasilitasi diskusi yang konstruktif. Kemudian, *institusional design* menjadi landasan penting yang menciptakan aturan main yang jelas dan menjamin keterbukaan dalam kerja sama. Dalam *Collaborative Process*, proses kolaborasi dimulai dengan diskusi tatap muka guna mencapai konsensus, membangun kepercayaan, serta menciptakan tanggung jawab kolektif untuk menghasilkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Setelah tahapan-tahapan tersebut berjalan, *intermediate outcomes* menjadi indikator keberhasilan awal dari kolaborasi, di mana kegiatan bersama yang konsisten dalam jangka waktu tertentu menunjukkan efektivitas kerja sama dibandingkan metode lainnya. Meskipun hasil sementara telah dicapai, dampak yang dihasilkan tetap menjadi faktor penting dalam mendorong keberlanjutan kerja sama hingga mencapai tujuan akhir yang diharapkan.

Model *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh (Ansell & Gash, 2008) menekankan bahwa keberhasilan proses ini sangat bergantung pada sejauh mana pemangku kepentingan dapat berkomitmen terhadap tujuan bersama. Komitmen ini bukan hanya sekadar keterlibatan simbolis, tetapi juga mencerminkan kesiapan setiap aktor untuk bekerja sama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, proses kolaboratif harus dirancang sebagai mekanisme yang berkelanjutan, di mana interaksi antara aktor dilakukan secara berulang dan berdasarkan prinsip transparansi. Keberlanjutan kolaborasi dapat diperkuat melalui mekanisme institusional yang jelas, termasuk regulasi, struktur organisasi, serta prosedur evaluasi yang dapat memastikan akuntabilitas dalam

pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, mekanisme pemantauan dan evaluasi menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas kolaborasi dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Selain itu, tata kelola kolaboratif juga harus mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal, baik dalam hal regulasi, kebijakan, maupun dinamika sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, *Collaborative Governance* tidak hanya dipandang sebagai suatu strategi dalam pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai pendekatan normatif yang menuntut keterlibatan aktif dari berbagai pihak untuk mencapai solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam kebijakan publik. Dengan demikian, penerapan tata kelola kolaboratif memerlukan kombinasi antara kepemimpinan yang inklusif, mekanisme koordinasi yang fleksibel, serta komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Collaborative governance adalah pendekatan yang menekankan partisipasi aktif, dialog deliberatif, dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan bersama. Keberhasilannya bergantung pada kepercayaan antar pemangku kepentingan, kapasitas institusional, mekanisme koordinasi, dan kepemimpinan fasilitatif. Namun, tantangan seperti perbedaan kepentingan dan ketidakseimbangan kekuasaan dapat mempengaruhi efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas, struktur kelembagaan yang fleksibel, serta mekanisme evaluasi yang memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Untuk memahami dinamika dalam implementasi *collaborative governance*,

dapat digunakan teori peran aktor (*actor-centered theory*) yang menekankan bahwa setiap aktor baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil memiliki sumber daya, kepentingan, dan strategi yang berbeda. Pemerintah biasanya berperan sebagai fasilitator dan regulator, sektor swasta sebagai penyedia sumber daya dan inovasi, sementara masyarakat sipil bertindak sebagai pengawas sekaligus agen aspirasi publik. Interaksi dan negosiasi di antara ketiganya membentuk proses kebijakan yang lebih adaptif dan partisipatif. Dengan demikian, *Collaborative Governance* bukan hanya strategi kebijakan, tetapi juga pendekatan normatif untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif melalui distribusi peran yang seimbang dan deliberatif.

2. Program *Sinau Bareng*

Program *Sinau Bareng* di Surabaya merupakan inisiatif Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan akses

pendidikan dan kualitas pembelajaran bagi siswa melalui pendekatan berbasis komunitas. Program ini diselenggarakan di Balai RW dengan melibatkan mahasiswa, guru, serta masyarakat sebagai tenaga pendamping belajar secara sukarela. *Sinau Bareng* dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kondusif, di mana siswa mendapatkan bimbingan akademik maupun pembelajaran keagamaan melalui sesi *Ngaji Bareng*. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya peningkatan literasi dan numerasi, tetapi juga sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pendidikan berbasis gotong royong. Dengan jadwal yang terstruktur dan penyebaran di berbagai wilayah Surabaya, *Sinau Bareng* menjadi salah satu bentuk implementasi kolaboratif dalam pendidikan yang mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam mendukung perkembangan akademik dan karakter peserta didik.



Gambar 4. Liputan Kegiatan *Sinau Bareng*

Sumber: Jurnal Post, 2025

Program *Sinau Bareng* di Kelurahan Karangpilang merupakan hasil kolaborasi yang muncul sebagai respons terhadap tantangan pendidikan anak-anak di era digital. Perkembangan teknologi

telah memberikan manfaat sekaligus tantangan, terutama terkait meningkatnya penggunaan perangkat digital yang berisiko menyebabkan kecanduan gadget dan berkurangnya waktu belajar. Selain

itu, kesibukan orang tua dalam bekerja seringkali mengurangi perhatian terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Melihat kondisi tersebut, tokoh masyarakat bersama Karang Taruna RT 06 RW 02 menggagas program ini sebagai upaya berbasis komunitas untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Tujuan utama *Sinau Bareng* adalah menciptakan lingkungan belajar yang suportif melalui pendekatan inklusif dan kolaboratif. Program ini berfokus pada pendampingan belajar, membangun motivasi anak-anak dalam menempuh pendidikan serta mengaji, sekaligus menyediakan ruang bagi mereka untuk terlibat dalam aktivitas yang positif, rekreatif, dan produktif. Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak di Karangpilang dapat mengembangkan potensi akademik dan karakter mereka, serta mengurangi dampak negatif dari penggunaan teknologi secara berlebihan.

Program *Sinau Bareng* di Kota Surabaya merupakan salah satu inovasi daerah yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 136 Tahun 2023 tentang Daftar Inovasi Daerah. Program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan dan menyediakan pendampingan belajar bagi anak-anak melalui keterlibatan aktif masyarakat, mahasiswa, serta tenaga pendidik. Implementasi program ini mencerminkan strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan berbasis komunitas sebagai bagian dari upaya pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh anak di wilayah tersebut.

Di samping *Sinau Bareng*, Dinas Pendidikan Kota Surabaya juga mengembangkan berbagai inovasi pendidikan lainnya yang turut diatur dalam Perwali Nomor 136 Tahun 2023.

Beberapa di antaranya meliputi *Sekolahe Arek Suroboyo*, yang bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih inklusif, serta Rapor *Online* yang telah disesuaikan dengan prinsip Kurikulum Merdeka Belajar. Kehadiran sistem rapor berbasis digital ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam pemantauan perkembangan akademik siswa serta mendukung transparansi dalam proses penilaian.

Selain itu, inovasi lain yang turut dikembangkan adalah *Tryout Online*, yang dirancang sesuai dengan Kurikulum Merdeka Belajar. Program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman ujian yang lebih adaptif dan berbasis teknologi bagi peserta didik, sehingga mereka dapat lebih siap dalam menghadapi evaluasi akademik. Keberadaan berbagai inovasi pendidikan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam mengintegrasikan teknologi dan kebijakan pendidikan guna menciptakan sistem pembelajaran yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu bentuk implementasi kebijakan inovatif, *Sinau Bareng* mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat guna menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan. Dengan adanya payung hukum dalam Perwali tersebut, program ini diharapkan dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Surabaya.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan kerangka teori *Collaborative Governance* untuk menganalisis implementasi Program *Sinau Bareng* di Kelurahan Karangpilang. Fokus

penelitian diarahkan pada bagaimana modal sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat, serta keterlibatan mahasiswa, memengaruhi keberhasilan program ini. Selain itu, pendekatan pendampingan dan diskusi yang inklusif menjadi pijakan utama untuk memahami dinamika sosial dan efektivitas program dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas pendidikan anak-anak. Model penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan pendidikan berbasis komunitas yang inovatif dan berkelanjutan di Indonesia.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan Program *Sinau Bareng* di Kelurahan Karangpilang, Surabaya. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk interaksi antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat.

Sasaran penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Karangpilang, khususnya anak-anak sebagai peserta program, orang tua, tokoh masyarakat, serta mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan *Sinau Bareng*. Informan kunci meliputi penyelenggara program dari pihak pemerintah, perangkat RT/RW, pemuda Karang Taruna, dan mahasiswa. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan peran mereka dalam program ini, keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kegiatan, serta kemampuan memberikan informasi yang relevan (Sulistyowaty et al., 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara

mendalam digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan evaluasi para informan terkait program *Sinau Bareng*. Observasi partisipatif dilakukan dengan terlibat langsung dalam beberapa sesi program untuk mencatat dinamika kegiatan dan interaksi antar aktor. Dokumentasi berupa foto, video, serta catatan dari pelaksanaan program digunakan untuk mendukung data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Instrumen penelitian dikembangkan dalam bentuk pedoman wawancara semi-terstruktur untuk memastikan fleksibilitas dalam menggali informasi dari informan. Panduan observasi juga disusun untuk mencatat aktivitas, partisipasi peserta, serta kendala yang muncul selama pelaksanaan program. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Langkah-langkah analisis meliputi pengorganisasian data, pengkodean awal, identifikasi tema utama, dan interpretasi temuan berdasarkan kerangka teori yang telah ditentukan (Ridwan & Hartono, 2023).

Hal yang dianalisis meliputi kolaborasi program, peran mahasiswa, serta respons masyarakat terhadap keberadaan program ini. Definisi operasional dari tersebut mencakup indikator seperti tingkat keterlibatan mahasiswa, tingkat kehadiran dan partisipasi anak-anak, serta persepsi masyarakat mengenai manfaat program. Analisis data dilakukan secara induktif dengan menghubungkan temuan di lapangan khususnya terkait modal sosial, budaya, dan habitus masyarakat setempat dilakukan dengan cara mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan. Hasil

analisis juga diverifikasi melalui diskusi dengan beberapa informan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan penelitian. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam tentang pelaksanaan dan dampak Program *Sinau Bareng* di Kelurahan Karangpilang.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Kolaborasi Program *Sinau Bareng* sesuai model Ansell and Gash

a) *Starting Condition/Kondisi Awal*

Menurut Bu Sukasih, salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Karangpilang, Program *Sinau Bareng* muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran yang semakin meningkat terkait menurunnya motivasi belajar anak-anak akibat kecanduan gawai. "*Anak-anak cenderung menghabiskan lebih banyak waktu dengan perangkat digital dibandingkan dengan aktivitas belajar. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan pengawasan dari orang tua yang*

disibukkan dengan pekerjaan, sehingga anak-anak memiliki lebih sedikit bimbingan dalam mengelola waktu mereka untuk kegiatan yang lebih edukatif dan produktif." ungkap seorang perwakilan Karang Taruna setempat. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat, terutama karena anak-anak semakin jarang mengikuti kegiatan edukatif maupun aktivitas produktif lainnya. Oleh karena itu, komunitas setempat merasa perlu menghadirkan solusi yang dapat membantu anak-anak dalam mengembangkan kebiasaan belajar yang lebih baik.

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah bekerja sama untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Selain itu, program ini juga memberikan ruang bagi anak-anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan mengembangkan keterampilan lain di luar akademik. Dengan adanya metode pembelajaran yang lebih menarik, diharapkan anak-anak dapat mengurangi ketergantungan mereka terhadap gawai dan lebih aktif dalam kegiatan positif.



Gambar 5. Wawancara kepada Ibu Sukasih

Sumber: Penulis, 2025

Dari sisi pemerintah, dukungan terhadap program ini diwujudkan melalui

penyediaan fasilitas dan pendampingan teknis agar program dapat berjalan secara

berkelanjutan. Ibu Titik Sulistiana, Kasi Kesra Kelurahan Karangpilang, menegaskan bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam memastikan efektivitas program. Selain itu, evaluasi berkala dilakukan untuk mengukur keberhasilan program serta menyesuaikan pelaksanaannya dengan kebutuhan anak-anak dan masyarakat.

b) *Facilitative leadership/Kepemimpinan fasilitatif*

Kepemimpinan fasilitatif yang dijalankan oleh pemerintah kelurahan memainkan peran penting dalam keberhasilan Program *Sinau Bareng*. Pemerintah, khususnya melalui Kasi Kesra, tidak hanya bertindak sebagai pengarah, tetapi juga mengambil peran aktif dalam memastikan program berjalan sesuai rencana. Pemerintah menyediakan dukungan logistik, seperti fasilitas belajar dan kebutuhan teknis lainnya, untuk mendukung keberlangsungan program. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian pada perencanaan yang matang, termasuk melalui rapat koordinasi dengan mahasiswa, tokoh masyarakat, dan perangkat kelurahan untuk memastikan setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya.

Sebagai fasilitator, pemerintah kelurahan membuka ruang dialog yang konstruktif untuk merespons masukan dan kebutuhan masyarakat. Menurut Ibu Titik Sulistiana, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dengan melibatkan semua pihak untuk meninjau

perkembangan dan kendala program. “*Kami memastikan program ini berjalan dengan baik melalui evaluasi berkala yang melibatkan semua pihak,*” ungkapnya. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kejelasan arah program tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan bersama di antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah, yang menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan program. Pelaksanaan Program *Sinau Bareng* di Kelurahan Karangpilang, Surabaya, merupakan contoh nyata implementasi *collaborative governance* seperti yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash. Pendekatan ini melibatkan kolaborasi antara Pemerintah Kota Surabaya, mahasiswa, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi anak-anak. Program ini bertujuan untuk mengatasi kecanduan gadget pada anak-anak, meningkatkan motivasi belajar, dan menyediakan kegiatan yang produktif. Pemerintah Kota, melalui perangkat kelurahan seperti Kasi Kesra, memainkan peran utama sebagai fasilitator. Mereka mendukung program dengan merancang kebijakan, menyediakan sumber daya, dan memastikan komunikasi yang efektif antar pihak. Mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala memungkinkan pemerintah untuk mengukur efektivitas program, sekaligus memastikan keberlanjutan melalui keterlibatan aktif dari tokoh masyarakat dan aparat pendidikan.



Gambar 6. Kegiatan Sinau Bareng

Sumber: Penulis, 2025

Pemerintah Kota Surabaya, melalui perangkat kelurahan, mendukung penuh inisiatif ini dengan memberikan sumber daya dan memfasilitasi proses perencanaan. Dukungan ini mencakup penyediaan fasilitas, koordinasi antar pihak, dan pemberian panduan teknis bagi pelaksana program, sehingga Program *Sinau Bareng* dapat dimulai dengan landasan yang kuat dan partisipasi yang meluas (Setiawan et al., 2023).

c) *Institusional Design*

Desain kelembagaan program ini melibatkan berbagai pihak melalui

mekanisme perencanaan yang partisipatif. Pemerintah kelurahan mengadakan rapat koordinasi berkala dengan mahasiswa, masyarakat, dan tokoh setempat untuk menyamakan visi dan membagi tanggung jawab.

Peran fasilitatif pemerintah terlihat jelas dalam memberikan dukungan logistik dan membuka ruang diskusi untuk merespons masukan dari masyarakat. Dalam proses kolaborasi dan partisipasi, Partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dalam keberhasilan program ini



Gambar 7. Antusias Anak Anak dalam Belajar

Sumber: Penulis, 2025

Program dimulai dengan identifikasi kebutuhan melalui survei dan diskusi dengan masyarakat, disusul oleh

sosialisasi dan pelatihan bagi mahasiswa dan pengajar. Di tahap implementasi, anak-anak difasilitasi belajar di Balai RW

dengan bimbingan dari mahasiswa dan tokoh masyarakat. Program ini juga menyediakan kegiatan tambahan yang bersifat rekreatif untuk menjaga semangat anak-anak. Pemerintah dan tokoh masyarakat mengadakan rapat koordinasi secara berkala, memanfaatkan media komunikasi seperti grup *WhatsApp* untuk memastikan informasi berjalan lancar.

Program *Sinau Bareng* memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar anak-anak dan keterlibatan orang tua. Anak-anak tidak hanya mendapatkan bimbingan belajar, tetapi juga aktivitas rekreatif yang menjaga semangat mereka. Selain itu, program ini mempererat hubungan sosial di antara warga. Ibu Titik menegaskan, "Program ini memberikan dampak yang sangat baik, tidak hanya untuk anak-anak tetapi juga untuk kohesi sosial Masyarakat". pelaksanaan Program *Sinau Bareng* di Kelurahan Karangpilang berhasil mewujudkan prinsip-prinsip *Collaborative Governance*. Kendati terdapat tantangan awal, seperti keterbatasan fasilitas dan kurangnya motivasi sebagian mahasiswa, kolaborasi yang kuat antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat mampu mengatasi hambatan tersebut. Program ini menjadi model bagi inisiatif serupa di wilayah lain.

Secara keseluruhan, program ini dilaksanakan dengan tahapan yang jelas, dimulai dari survei kebutuhan masyarakat, sosialisasi, pelatihan pengajar, hingga pelaksanaan kegiatan belajar di Balai RW. Pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat bekerja sama dengan baik, memanfaatkan komunikasi yang efektif melalui grup *WhatsApp* untuk koordinasi. Walaupun ada tantangan awal seperti kurangnya motivasi mahasiswa dan keterbatasan fasilitas, namun semua pihak bekerja sama untuk mengatasi hambatan tersebut.

Program *Sinau Bareng* di Kelurahan Karangpilang memberikan dampak positif, tidak hanya untuk anak-anak dalam hal peningkatan pendidikan, tetapi juga untuk mempererat hubungan sosial di antara masyarakat setempat.

d) Collaborative Process/ Proses Kolaborasi

Pemerintah Kota Surabaya memberikan respon yang sangat positif terhadap pelaksanaan Program *Sinau Bareng* di Kelurahan Karangpilang, khususnya terkait dengan efektivitas program dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di lingkungan tersebut. Ibu Titik Sulistiana, yang menjabat sebagai Kasi Kesra di Kelurahan Karangpilang, menjelaskan bahwa latar belakang program ini adalah keprihatinan terhadap anak-anak yang mulai kehilangan waktu belajar akibat kecanduan gadget dan kurangnya motivasi belajar karena dukungan orang tua yang terbatas. Pemerintah kota, melalui kelurahan dan dukungan dari berbagai instansi terkait, berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program ini. Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keberhasilan Program *Sinau Bareng* di Kelurahan Karangpilang dengan memberikan perhatian khusus terhadap koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam program ini. Kelurahan Karangpilang Ibu Titik Sulistiana, selaku Kasi Kesra Kelurahan Karangpilang, menegaskan bahwa pemerintah kota tidak hanya terlibat pada tahap pelaksanaan, tetapi juga dalam perencanaan awal dan evaluasi program. Koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa sangat penting agar program ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pemerintah kelurahan berperan aktif dalam

memfasilitasi jalannya program, mulai dari penyediaan tempat, pengorganisasian kegiatan, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di lapangan.



Gambar 8. Kejuaraan BBGRM melalui Program Sinau Bareng

Sumber: SwaraneWS, 2022

Selain itu, pemerintah kota turut memberikan dukungan penuh terhadap kebutuhan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan program Sinau Bareng. Sebagai bagian dari perayaan Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat (BBGRM), Pemerintah Kota Surabaya mengadakan Lomba Kelurahan Berhasil. Dalam ajang tersebut, Kelurahan Karangpilang berhasil meraih posisi juara pertama dan sekaligus menjadi wakil Kota Surabaya dalam nominasi BBGRM Terbaik di tingkat Provinsi Jawa Timur 2022.

Salah satu aspek penting dalam pencapaian ini adalah program Sinau Bareng. Keikutsertaan berbagai media dalam kolaborasi tersebut turut berperan dalam meningkatkan eksposur Kelurahan Karangpilang, sehingga mendapat perhatian dari media luar. Hal ini tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat, karena semakin dikenal di daerah lain dan membuka lebih banyak peluang serta manfaat bagi mereka.

Salah satu aspek yang ditekankan adalah pentingnya koordinasi yang transparan antara berbagai pihak yang terlibat. Peran aktif dari aparat kelurahan, mahasiswa, dan masyarakat harus berjalan seiring dengan tujuan yang telah disepakati. Untuk itu, rapat koordinasi berkala menjadi hal yang sangat penting agar semua pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya. Melalui pertemuan rutin ini, masing-masing pihak dapat berbagi informasi, memberikan masukan, serta mengatasi kendala yang muncul dalam proses pelaksanaan program. Dengan demikian, komunikasi yang terbuka dan jelas akan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat berada pada jalur yang sama dalam mendukung keberhasilan program.

Mekanisme monitoring dan evaluasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya juga berperan penting dalam memastikan efektivitas program. Ibu Titik menambahkan bahwa mekanisme ini mencakup perencanaan yang matang, pelaksanaan yang sesuai

dengan jadwal, serta pelaporan yang transparan. Dengan adanya evaluasi yang sistematis, pihak terkait dapat mengetahui sejauh mana pencapaian program dan apa saja yang perlu diperbaiki. Monitoring yang dilakukan secara berkala memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat dalam mengatasi masalah yang muncul di lapangan (Suyono et al., 2023).

Pemerintah Kota Surabaya berharap, dengan evaluasi yang menyeluruh, program ini bisa terus berkembang dan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan anak-anak di Kelurahan Karangpilang, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kegiatan tersebut. Perhatian pemerintah kota terhadap koordinasi dan evaluasi yang baik dalam program *Sinau Bareng* menunjukkan upaya serius untuk menciptakan program pendidikan berbasis masyarakat yang efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerjasama yang solid antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat, serta mekanisme pengawasan yang transparan dan terstruktur dengan baik. Dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Surabaya, program ini diharapkan dapat terus berkembang, memberikan manfaat yang lebih besar, dan menjadi contoh yang dapat diterapkan di kelurahan-kelurahan lainnya di Surabaya.

Secara keseluruhan, respon pemerintah kota terhadap efektivitas pelaksanaan program ini menunjukkan dukungan yang kuat. Pemerintah Kota Surabaya melihat *Sinau Bareng* sebagai program yang sangat relevan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat lokal, dan mereka berkomitmen untuk terus memberikan dukungan agar program ini dapat terus

berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Dapat disimpulkan bahwa setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam program memiliki peran, tingkat keterlibatan, dan kontribusi yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan kapasitas masing-masing. Pemerintah Kota Surabaya berperan sebagai inisiator dan fasilitator utama dengan menunjukkan komitmen kuat, tidak hanya dalam tahap implementasi, tetapi juga sejak perencanaan hingga evaluasi program. Pemerintah kota menyediakan dukungan kebijakan, sumber daya, serta memastikan keberlangsungan program melalui integrasi dengan agenda pembangunan daerah, seperti Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Di tingkat lokal, Kelurahan Karangpilang, melalui Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Ibu Titik Sulistiana, berperan penting dalam mengorganisir kegiatan, menyediakan fasilitas, serta menjembatani koordinasi antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah kota. Kelurahan menjadi simpul koordinasi yang menjaga kelancaran komunikasi antarpihak yang terlibat.

Mahasiswa turut ambil bagian sebagai fasilitator kegiatan belajar dan pendamping anak-anak dalam mengerjakan tugas sekolah, serta memberikan motivasi dan bimbingan yang dibutuhkan. Mereka tidak hanya menjadi pelaksana lapangan, tetapi juga terlibat aktif dalam pertemuan koordinasi dan menerima pelatihan agar lebih siap dalam proses belajar-mengajar. Masyarakat, khususnya para orang tua, berperan sebagai penerima manfaat sekaligus mitra kolaboratif, dengan memberikan dukungan moral, logistik, bahkan dalam beberapa kasus ikut serta sebagai relawan. Kehadiran mereka sangat penting untuk

memastikan bahwa anak-anak dapat mengikuti kegiatan secara rutin dan mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga.

Sementara itu, media memiliki peran penting dalam meningkatkan eksposur program, sehingga keberhasilan Kelurahan Karangpilang dapat diketahui secara luas dan memberikan dampak positif terhadap citra serta potensi pengembangan wilayah. Dukungan dari berbagai lembaga atau instansi lain, seperti dinas pendidikan atau organisasi kemasyarakatan, juga memberikan kontribusi dalam bentuk pelatihan, sarana prasarana, atau bantuan teknis. Semua pihak bekerja dalam semangat kolaboratif melalui rapat koordinasi berkala, mekanisme evaluasi, dan sistem komunikasi terbuka yang memungkinkan setiap stakeholder memahami peran, tanggung jawab, serta tujuan bersama. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting bagi keberhasilan Program Sinau Bareng sebagai bentuk pendidikan berbasis masyarakat yang efektif dan berkelanjutan.

2. Tantangan Yang dihadapi

Program *Sinau Bareng* di Kelurahan Karangpilang menghadapi

beberapa tantangan, terutama pada tahap awal kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat. Berikut adalah tantangan yang dihadapi dalam implementasi Program *Sinau Bareng*, khususnya pada tahap awal kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat:

a) Kurangnya Pemahaman dan Motivasi dari Mahasiswa

Pada tahap awal implementasi program *Sinau Bareng*, banyak mahasiswa yang kurang memahami sepenuhnya manfaat yang bisa mereka peroleh dari berkolaborasi dalam kegiatan ini. Sebagian dari mereka datang dengan anggapan bahwa program ini hanya sekadar kegiatan sosial tanpa tujuan akademik yang jelas. Hal ini menyebabkan rendahnya motivasi mereka untuk berpartisipasi secara aktif. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dalam memberikan pemahaman tentang tujuan jangka panjang program, baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. Program ini tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak yang diajar, tetapi juga memberi pengalaman berharga kepada mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan kepemimpinan.



Gambar 9. Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah dalam Program *Sinau Bareng*

Sumber: Penulis, 2025

Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi yang intensif

dengan mahasiswa, menjelaskan bagaimana program ini bisa memperkaya

pengalaman mereka di luar akademik dan memperkenalkan mereka pada konsep pengabdian masyarakat yang nyata. Penjelasan ini akan membantu mahasiswa melihat nilai dari program ini, baik dalam konteks pribadi maupun professional (Vikri et al., 2023). Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan mereka bisa lebih termotivasi untuk terlibat lebih aktif.

b) Kurang Percaya Diri Mahasiswa

Tantangan lain yang muncul adalah kurangnya rasa percaya diri di kalangan mahasiswa, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman dalam mengajar atau berinteraksi dengan anak-anak. Mahasiswa yang baru pertama kali terlibat dalam kegiatan mengajar mungkin merasa cemas tentang bagaimana cara menyampaikan materi kepada anak-anak dengan cara yang efektif. Mereka khawatir tidak bisa memberikan pengajaran yang memadai atau tidak mampu menjalin hubungan yang baik dengan peserta didik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan program pelatihan atau orientasi awal bagi mahasiswa. Pelatihan ini bisa mencakup teknik-teknik dasar mengajar, pengelolaan kelas, dan cara berinteraksi dengan anak-anak. Selain itu, pembimbingan dan pendampingan yang terus-menerus dari fasilitator yang lebih berpengalaman dapat membantu mahasiswa merasa lebih percaya diri (Siswanto, 2024). Dengan pendekatan yang sistematis, mahasiswa akan merasa lebih siap menghadapi tantangan mengajar dan memberikan kontribusi yang maksimal dalam program *Sinau Bareng*.

c) Kendala Waktu dan Jadwal

Salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh mahasiswa dalam program *Sinau Bareng* adalah kendala waktu dan jadwal. Mahasiswa harus menyeimbangkan kewajiban akademik

mereka dengan komitmen terhadap program ini. Banyak mahasiswa yang merasa kesulitan untuk mengatur waktu antara kuliah, tugas, ujian, dan kegiatan *Sinau Bareng*. Kendala ini menyebabkan keterlambatan atau ketidakhadiran mahasiswa dalam beberapa sesi pengajaran. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pengelola program untuk melakukan perencanaan waktu yang lebih fleksibel dan efisien. Misalnya, jadwal pengajaran bisa disesuaikan dengan waktu luang mahasiswa, seperti pada akhir pekan atau sore hari setelah jam kuliah. Koordinasi yang baik antara mahasiswa, pengelola program, dan pemerintah setempat diperlukan untuk memastikan bahwa jadwal yang dibuat tidak bertabrakan dengan kewajiban akademik mahasiswa, serta memberikan ruang bagi mereka untuk berkontribusi secara maksimal tanpa mengorbankan studi mereka.

d) Kesulitan Beradaptasi dengan Lingkungan Baru

Beberapa mahasiswa yang berasal dari luar daerah atau dengan latar belakang sosial yang berbeda mungkin mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat setempat. Dalam konteks *Sinau Bareng*, mahasiswa diharapkan untuk tidak hanya mengajar, tetapi juga berinteraksi secara langsung dengan anak-anak dan orang tua. Mahasiswa yang tidak familiar dengan kebiasaan atau budaya lokal mungkin merasa canggung atau kesulitan dalam berkomunikasi, yang bisa mempengaruhi keberhasilan program. Untuk memfasilitasi proses adaptasi ini, mahasiswa perlu diberikan pemahaman tentang kondisi sosial dan budaya yang ada di masyarakat setempat. Program orientasi mengenai budaya lokal dan teknik komunikasi yang baik dapat sangat

membantu (Karno et al., 2023). Selain itu, mentor atau fasilitator dari masyarakat setempat juga bisa diikutsertakan dalam sesi awal program untuk membantu menjembatani perbedaan budaya dan memfasilitasi interaksi yang lebih efektif antara mahasiswa dan masyarakat.

e) Keterbatasan Fasilitas dan Materi Pengajaran

Kendala yang cukup signifikan dalam implementasi program *Sinau Bareng* adalah terbatasnya fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung kegiatan belajar-mengajar. Banyak Balai RW yang tidak memiliki ruang kelas yang memadai, alat bantu mengajar yang lengkap, atau fasilitas pendukung lainnya seperti proyektor atau komputer. Kondisi ini bisa membatasi efektivitas pengajaran dan mengurangi kualitas pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak.

Mengatasi masalah ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menyediakan fasilitas yang memadai. Salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan adalah penggalangan dana atau dukungan dari berbagai pihak, seperti perusahaan atau komunitas, untuk menyumbangkan alat bantu belajar. Selain itu, kreativitas dalam menggunakan sarana yang ada, seperti papan tulis, buku-buku, dan media pembelajaran sederhana lainnya, bisa menjadi alternatif sementara (Maftuhah et al., 2023). Penggunaan teknologi yang lebih murah dan mudah diakses, seperti aplikasi belajar di *smartphone*, juga bisa menjadi solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan fasilitas.

Kendala yang cukup signifikan dalam implementasi *Program Sinau Bareng* adalah terbatasnya fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung kegiatan belajar-mengajar. Banyak Balai

RW yang tidak memiliki ruang kelas yang memadai, alat bantu mengajar yang lengkap, maupun fasilitas pendukung seperti proyektor atau komputer. Keterbatasan ini berdampak langsung pada efektivitas proses belajar-mengajar dan dapat mengurangi kualitas pembelajaran yang diterima anak-anak. Dalam kerangka teori *collaborative governance*, keberhasilan suatu program sangat bergantung pada kapasitas institusional dan mekanisme koordinasi yang berjalan di antara para pemangku kepentingan. Dalam kasus *Sinau Bareng*, meskipun koordinasi antara kelurahan, mahasiswa, dan masyarakat sudah berjalan melalui rapat rutin dan komunikasi terbuka, keterbatasan kapasitas terutama dalam bentuk sarana fisik menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan program. Pemerintah kelurahan memiliki kapasitas administratif namun terbatas secara finansial, sementara mahasiswa sebagai pelaksana teknis juga memiliki keterbatasan dalam akses sumber daya pendukung.

Solusi atas kendala ini membutuhkan sinergi lintas sektor. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memberi perhatian khusus dalam penyediaan fasilitas yang memadai. Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah menggandeng sektor swasta atau komunitas melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk menyumbangkan alat bantu belajar. Di sisi lain, kepemimpinan fasilitatif dari pihak kelurahan menjadi penting dalam menjembatani komunikasi, mengoordinasikan kebutuhan, dan menggerakkan sumber daya yang tersedia. Kreativitas dalam memanfaatkan fasilitas seadanya, seperti papan tulis, buku bekas, atau media pembelajaran sederhana, juga menjadi alternatif yang patut

dikembangkan, sambil memanfaatkan teknologi yang lebih terjangkau seperti aplikasi belajar di *smartphone*.

Selain faktor kapasitas, tantangan lain dalam *collaborative governance* adalah perbedaan kepentingan dan ketidakseimbangan kekuasaan antar pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi efektivitas program. Dalam konteks *Sinau Bareng*, masing-masing pihak membawa kepentingan yang berbeda. Pemerintah kota berorientasi pada capaian program dan pencitraan keberhasilan program sebagai bagian dari indikator kinerja, sementara pihak kelurahan lebih fokus pada implementasi praktis di lapangan dan menjaga hubungan sosial dengan masyarakat. Mahasiswa, di sisi lain, terkadang lebih melihat program ini sebagai wadah pengabdian atau bahkan kewajiban akademik, sehingga komitmen mereka bisa beragam. Masyarakat sebagai penerima manfaat berharap adanya peningkatan nyata dalam pendidikan anak, namun tidak selalu mampu menyediakan dukungan yang dibutuhkan karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Ketidakseimbangan ini dapat memunculkan friksi atau kesenjangan ekspektasi antar pihak jika tidak dikelola dengan baik.

Oleh karena itu, menciptakan kepercayaan antar aktor, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta membangun mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif menjadi langkah strategis untuk menjaga efektivitas dan keberlanjutan Program *Sinau Bareng*. Kolaborasi yang sejati hanya dapat terwujud ketika setiap pihak tidak hanya hadir secara simbolis, tetapi terlibat secara aktif dan sejajar dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Pelaksanaan Program *Sinau Bareng* di Kelurahan Karangpilang, Surabaya, menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan motivasi belajar anak-anak serta mempererat hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan mahasiswa. Program ini berhasil mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap pendidikan anak-anak di lingkungan mereka, sekaligus mendorong anak-anak untuk lebih antusias dalam menjalani aktivitas belajar di luar sekolah. Keberhasilan program ini tidak lepas dari peran aktif pemerintah kota yang memfasilitasi sumber daya, serta mahasiswa yang terlibat langsung dalam proses pengajaran. Sinergi antara ketiga pihak ini menjadi kunci utama dalam menjamin kelancaran dan efektivitas program.

Selain itu, masyarakat turut mendukung pelaksanaan program ini dengan memberikan respons yang positif dan mendukung penuh kegiatan yang berlangsung. Partisipasi orang tua sangat terasa, terutama dalam mendorong anak-anak untuk hadir dan berpartisipasi dalam setiap sesi *Sinau Bareng*. Hal ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya fokus pada pengajaran akademis semata, tetapi juga menciptakan ruang bagi anak-anak untuk beraktivitas secara positif dan rekreatif. Dalam hal ini, mahasiswa juga berperan sebagai penggerak yang membawa semangat baru dalam pembelajaran, sehingga mendorong anak-anak untuk lebih semangat dalam belajar dan mengaji.

Namun demikian, beberapa tantangan dihadapi, terutama pada tahap awal kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat. Kendala yang muncul antara

lain adalah kurangnya motivasi beberapa mahasiswa yang awalnya tidak sepenuhnya memahami manfaat dan tujuan program, serta keterbatasan fasilitas yang ada. Meskipun demikian, dengan koordinasi yang baik dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah, program ini dapat berjalan dengan efektif dan memperoleh hasil yang memuaskan. Keberlanjutan program ini memerlukan perhatian lebih lanjut terhadap peningkatan kapasitas pengajar lokal dan penyediaan fasilitas yang lebih memadai. Secara keseluruhan, Program *Sinau Bareng* dapat dijadikan contoh yang baik tentang bagaimana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa dapat meningkatkan kualitas pendidikan nonformal di tingkat komunitas. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya peran aktif berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak untuk belajar, berkembang, dan beraktivitas secara positif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa sangat penting untuk keberhasilan program berbasis komunitas seperti *Sinau Bareng*. Program ini menunjukkan bagaimana kekuatan kebersamaan dapat memfasilitasi pendidikan nonformal di tingkat kelurahan. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya peran pemerintah dalam mengkoordinasikan berbagai pihak, memberikan dukungan sumber daya, dan memastikan komunikasi yang transparan antara semua pihak yang terlibat. Keberlanjutan program ini akan bergantung pada evaluasi yang terstruktur serta peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif, terutama dalam memberikan dukungan untuk anak-anak yang mengikuti program ini. Oleh karena itu,

keberhasilan *Sinau Bareng* di Karangpilang dapat dijadikan model bagi program serupa di kelurahan lainnya.

2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut dari Program *Sinau Bareng* adalah sebagai berikut:

- a. Kepada Pemerintah Kota Surabaya, khususnya Dinas Pendidikan dan pihak kelurahan, disarankan untuk memperkuat pelatihan dan pembekalan bagi mahasiswa serta pengajar lokal. Hal ini penting untuk mengatasi permasalahan kesiapan pengajar yang masih terbatas dalam aspek pedagogis dan metodologi pengajaran. Pelatihan ini juga dapat mencakup teknik pengelolaan kelas, pendekatan pembelajaran kreatif, serta pemanfaatan teknologi sederhana.
- b. Kepada Pemerintah Kelurahan Karangpilang dan instansi pendukung, perlu dilakukan peningkatan fasilitas dan penyediaan alat bantu belajar, seperti papan tulis, proyektor mini, alat tulis, dan materi ajar visual. Rekomendasi ini merespon temuan bahwa banyak lokasi belajar, khususnya Balai RW, belum memiliki sarana yang memadai, sehingga membatasi kualitas interaksi dan efektivitas pembelajaran.
- c. Kepada masyarakat, terutama orang tua peserta program, diharapkan adanya peningkatan keterlibatan aktif dalam mendukung proses belajar anak di luar waktu pelaksanaan program. Rekomendasi ini merespons permasalahan rendahnya motivasi anak yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya perhatian dan dukungan dari lingkungan keluarga. Bentuk keterlibatan bisa berupa pendampingan

- belajar di rumah, komunikasi dengan pengajar, serta partisipasi dalam kegiatan evaluatif program.
- d. Kepada tim pengelola program di tingkat kelurahan dan pihak akademik pendamping, sebaiknya melaksanakan evaluasi program secara berkala untuk menilai efektivitas kegiatan, mengidentifikasi hambatan seperti keterbatasan fasilitas, ketidakteraturan waktu pelaksanaan, dan menyesuaikan pendekatan yang digunakan. Evaluasi ini harus berbasis data dan melibatkan semua pihak terkait agar menjadi dasar pengambilan keputusan yang partisipatif dan tepat sasaran.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah waktu yang terbatas untuk mengumpulkan data di lapangan, sehingga temuan-temuan yang diperoleh tidak sepenuhnya mewakili kondisi secara menyeluruh. Selain itu, jumlah responden yang terbatas, yaitu hanya melibatkan beberapa pihak dari mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah, juga membatasi ruang lingkup analisis. Penelitian ini juga tidak membahas secara mendalam tentang dampak jangka panjang dari program terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak-anak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih luas dan waktu observasi yang lebih panjang akan sangat bermanfaat untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan keberlanjutan program *Sinau Bareng*.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging. *Public Administration Review*, 75(5), 647–663. <https://doi.org/10.1111/puar.12432>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02665.x>
- Ghozalyfah, C. ., & Ratnawati, S. (2024). Implementasi Program Dinas Sebagai Pendidikan Sinau Bareng Kota Surabaya Dalam Meningkatkan Kreativitas Belajar. *INTELEKTUAL (E-Journal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi)*, 11(2), 156–163.
- Kamaliya, N., & Anshori, I. (2024). Strategi Pembelajaran dalam Meningkatkan Efektivitas Belajar Pada Anak di Era 4.0 (Kampung KarangPilang RT 06 RW 02 Surabaya). *Jendela PLS*, 9(1), 71–77.
- Karno, F., Putra, I. ., Pramesti, K. ., Ambarwati, N. ., Putri, N. R. ., Dewi, R. ., & Mauludiyah, K. . (2023). Peningkatan Semangat Belajar Anak Usia Dini Melalui Sinau Bareng di Dusun Besuk-Desa Lemujut. *Prioritas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(02), 8–14.
- Kiptiyah, P., & Wahyudi, K. D. . (2024). Program Program Sinau Bareng di

- RW 2 Desa Sumberwelut Kota Surabaya.: Meningkatkan kualitas pembelajaran dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. *In Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS) (Vol. 3, Pp. 253-264).*
- Kristiyono, J., Safitri, D. E., NU, A. S., Nurmala, T., Jauhariya, K. C., & Kurniawati, H. (2023). Peningkatan Kompetensi Digital Marketing Program Kewirausahaan Batik Poetra Dolokgede di Kabupaten Bojonegoro Melalui Kegiatan “Sinau Bareng” Ademos Indonesia. *Prapanca: Jurnal Abdimas*, 3(1), 52–60.
- Maftuhah, R. A., Prastya, M. D. A., & Rizani, M. (2023). Sistem Sinau Bareng sebagai Bentuk Pendalaman Materi Ajar Sekolah Dasar di Desa Klepek Sukosewu Bojonegoro. *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 355–360.
- Purwanti, C. I., Wijaya, M. S., Azzahro, N. S., Kasih, P. C., Al Anshori, M. H., & Fiantika, F. R. (2023). Pendampingan Pembelajaran Melalui Program “Sinau Bareng Adi Buana” di Desa Kedungsumur Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. *Madaniya*, 4(4), 1644–1651.
- Ridwan, N. A., & Hartono, S. (2023). Collaborative Governance Program Sinau Bareng Untuk Mengatasi Kekerasan Kepada Anak Di Kelurahan Kandangan Surabaya. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(6), 149–156.
- Sajidah, H., Muqtadir, H. A., Al Farraz, S. F., Maharani, T., & Rahmatin, L. S. (2024). Implementasi Program Sinau Bareng Terhadap Peningkatan Minat Belajar Siswa Di Kelurahan Kejawan Putih Tambak Surabaya. *Integritas: Jurnal Pengabdian*, 8(2), 478–485.
- Setiawan, R., Rozzaq, G. A., Angin, L. R. D. P., Utomo, A. I. F., Wardana, R. A., & Syach, M. U. (2023). Gerakan “SINAU BARENG” Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa di Desa Gampang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 13–15.
- Siswanto, C. Y. D. (2024). Sinau Bareng: Model Peningkatan Minat Akademik Siswa Di Putat Gede, Surabaya. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(3), 399–402.
- Sulistiyowaty, R., Putri, N. M. S., Dhany, A., Aurellio, C. A. B., Runnada, W. A. Q., Faiziyah, D. N., Amaliyah, K., Sulistiyowaty, R., Putri, N. M. S., Dhany, A., Aurellio, C. A. B., Runnada, W. A. Q., Faiziyah, D. N., & Amaliyah, K. (2024). Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi melalui program Sinau Bareng di Kelurahan Kauman Kabupaten Nganjuk. *Jurnal ABDI: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2), 169–179.
- Suyono, S., Widiyanti, A., & Arieska, W. (2023). Antusias Anak-Anak Desa Keret Pada Gerakan “Sinau Bareng” Di Desa Keret, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. *DedikasiMU: Journal of Community Service*, 9(2), 371–374.
- Titisari, M. A., Hariyono, A., Sholichah, S. A., & Indraswara, W. T. (2023).

- Pendampingan Anak-Anak dengan Program Sinau Bareng di Desa Pranti, Sedati, Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Aplikasi Teknologi*, 2(1), 52–58.
- Vikri, A. N., Meisari, D. G., Hidayat, A. B. F., Khalik, M. D., & Mandasari, V. (2023). Implementasi Kegiatan Sinau Bareng Sebagai Wujud Pendalaman Kreatifitas Di Kelurahan Wonorejo. *Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia*, 2(4), 68–74.